

**PROCEDURE FOR REQUESTING FUND DISBURSEMENT
ORDERS (SP2D) FOR PETTY CASH VIA INFORMATION
SYSTEMS AT THE DEPARTMENT OF INVESTMENT AND
ONE-STOP INTEGRATED SERVICES (DPM-PTSP) OF JAMBI
PROVINCE**

**PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN
DANA (SP2D) UANG PERSEDIAAN MELALUI SISTEM
INFORMASI PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) PROVINSI
JAMBI**

Emelia Rita Dameria Br Purba^{1)}*

Dios Nugraha Putra²

1) Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

2) Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi, Jambi-Indonesia

**) Korespondensi*

*E-mail: emeliapurba@gmail.com^{*1)}*

ABSTRACT

This study aims to examine the procedure for submitting a Fund Disbursement Order (SP2D) for inventory money through the Regional Government Information System of the Republic of Indonesia (SIPD RI) at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPM-PTSP) of Jambi Province, as well as to identify the obstacles and solutions in its implementation. The research employed a descriptive qualitative method using observation and direct interviews with the expenditure treasurer. The results indicate that the SP2D submission procedure has been integrated with SIPD RI and the Regional General Cash Account (RKUD).

Keywords: *SP2D, Inventory Money, SIPD RI, Procedure, DPM-PTSP Jambi Province*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi, serta mengidentifikasi kendala dan solusi yang diterapkan dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara langsung dengan bendahara pengeluaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan SP2D telah terintegrasi dengan SIPD RI dan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran, verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD), persetujuan Pengguna Anggaran (PA), hingga penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Kata Kunci: SP2D, Uang Persediaan, SIPD RI, Prosedur, DPM-PTSP Provinsi Jambi

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem tata kelola pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah dituntut untuk mewujudkan sistem administrasi yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien guna mendukung prinsip good governance. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah diterapkannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019. SIPD RI merupakan sistem terintegrasi yang digunakan untuk mengelola informasi pembangunan daerah dan keuangan daerah secara elektronik, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pelaporan. Hambarwati (2025) menjelaskan bahwa penerapan sistem informasi pemerintahan mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah apabila didukung oleh komitmen organisasi dan kesiapan sumber daya manusia.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Jambi sebagai salah satu perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung pelayanan publik dan pengelolaan administrasi keuangan secara tertib. Dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari, instansi ini memerlukan dukungan dana melalui mekanisme uang persediaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2024. Uang persediaan merupakan dana yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk membiayai kebutuhan operasional rutin satuan kerja perangkat daerah yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung. Paulus dan Kindangen (2021) menyatakan bahwa pengelolaan uang persediaan memerlukan prosedur administrasi yang sistematis dan pengawasan yang ketat agar penggunaan dana tetap sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan tertib administrasi.

Salah satu tahapan penting dalam penggunaan uang persediaan adalah pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar yang telah diverifikasi. Said et al. (2021) menjelaskan bahwa SP2D menjadi instrumen utama dalam proses pencairan dana daerah karena berfungsi sebagai dasar legal dalam penyaluran dana dari Rekening Kas Umum Daerah kepada bendahara pengeluaran. Di DPM-PTSP Provinsi Jambi, proses pengajuan SP2D uang persediaan dilakukan melalui SIPD RI secara sistematis, dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran oleh bendahara pengeluaran, verifikasi oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan SKPD, persetujuan oleh Pengguna Anggaran, hingga penerbitan SP2D oleh Bendahara Umum Daerah.

Sebelum diterapkannya SIPD RI, proses pengajuan SP2D dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi, ketidaksesuaian dokumen, dan keterlambatan pencairan dana. Mutiara (2021) menyebutkan bahwa sistem manual dalam pengelolaan keuangan daerah sering menghadapi kendala teknis berupa kekeliruan pengisian dokumen dan lambatnya proses verifikasi. Implementasi SIPD RI memberikan perubahan signifikan karena sistem telah terintegrasi dengan Rekening Kas Umum Daerah, sehingga proses menjadi lebih cepat, terdokumentasi dengan baik, dan mudah dipantau. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti gangguan sistem, pembaruan aplikasi, serta masalah jaringan dan pemadaman listrik yang menyebabkan data tidak tersimpan dan proses pengajuan tertunda. Jogiyanto (2017) menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan prosedur dan kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya.

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji secara mendalam bagaimana prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) uang persediaan melalui SIPD RI di DPM-PTSP Provinsi Jambi, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penerapan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan DPM-PTSP Provinsi Jambi.

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian ini dituliskan teori-teori dan kajian-kajian pustaka yang berhubungan dengan objek penelitian. Hipotesis yang di bangun sesuai dengan penelitian-penelitian terdahulu serta kajian-kajian yang berhubungan dengan penelitian.

3. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam mengenai prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) pada DPM-PTSP Provinsi Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian

ini berfokus pada pemahaman proses, mekanisme, serta kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem, bukan pada pengujian hubungan statistik antarvariabel. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran faktual dan akurat mengenai fenomena yang diteliti sesuai dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif yang bersifat pendukung. Data kualitatif berupa informasi mengenai alur prosedur pengajuan SP2D, tahapan verifikasi, serta kendala dalam penggunaan SIPD RI. Data kuantitatif berupa dokumen administrasi dan laporan terkait proses pencairan dana. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengajuan SP2D Uang Persediaan, seperti bendahara pengeluaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, dan pihak terkait lainnya di DPM-PTSP Provinsi Jambi. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, literatur, serta arsip yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan penerapan SIPD RI.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung proses pengajuan SP2D melalui SIPD RI untuk memahami alur dan tahapan yang dijalankan. Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berwenang dan terlibat dalam proses tersebut guna memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai prosedur, hambatan, dan solusi yang diterapkan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari dokumen pendukung seperti Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar, serta dokumen SP2D yang diterbitkan melalui sistem.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara mengumpulkan data, mereduksi data, menyajikan data dalam bentuk narasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang ditemukan di lapangan. Analisis dilakukan dengan membandingkan prosedur yang berjalan dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan terkait untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan di DPM-PTSP Provinsi Jambi. Pengukuran variabel dalam penelitian ini bersifat konseptual karena menggunakan pendekatan kualitatif. Variabel yang diamati meliputi penerapan SIPD RI sebagai variabel independen yang dilihat dari aspek kemudahan penggunaan, kecepatan proses, dan ketepatan pencatatan, serta efektivitas prosedur pengajuan SP2D Uang Persediaan sebagai variabel dependen yang diukur melalui kelancaran proses, ketepatan waktu pencairan, dan tingkat kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.

Dengan desain penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai implementasi SIPD RI dalam prosedur pengajuan SP2D Uang Persediaan serta kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada DPM-PTSP Provinsi Jambi.

4. HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi telah dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) secara terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses dimulai dari pengajuan Surat Permintaan Pembayaran oleh bendahara pengeluaran melalui sistem, kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, disetujui oleh Pengguna Anggaran, dan selanjutnya diteruskan kepada Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkan SP2D. Seluruh tahapan dilakukan secara elektronik sehingga setiap proses terekam dalam sistem dan dapat dipantau secara real time.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, penerapan SIPD RI memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu dan ketertiban administrasi. Proses yang sebelumnya dilakukan secara manual dan memerlukan pengarsipan fisik kini telah terdigitalisasi, sehingga mengurangi risiko kehilangan dokumen dan kesalahan pencatatan. Integrasi sistem dengan Rekening Kas Umum Daerah juga mempercepat proses pencairan dana karena verifikasi dilakukan secara berjenjang dalam satu platform yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem telah mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam pelaksanaan pengajuan SP2D melalui SIPD RI. Kendala yang paling sering terjadi adalah gangguan jaringan internet, pembaruan sistem yang menyebabkan akses sementara terhenti, serta risiko data tidak tersimpan ketika terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Selain itu, faktor sumber daya manusia juga mempengaruhi kelancaran proses, terutama ketika terjadi perubahan regulasi atau pembaruan fitur dalam sistem yang memerlukan penyesuaian teknis. Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan pengajuan atau revisi dokumen apabila terjadi kesalahan input data.

Dari sisi kesesuaian prosedur dengan regulasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengajuan SP2D Uang Persediaan telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tahapan verifikasi dan persetujuan berjenjang. Setiap dokumen yang diajukan harus memenuhi

kelengkapan administrasi sebelum diproses lebih lanjut dalam sistem. Hal ini menunjukkan adanya pengendalian internal yang cukup memadai dalam proses pencairan dana.

Secara keseluruhan, implementasi SIPD RI dalam prosedur pengajuan SP2D Uang Persediaan di DPM-PTSP Provinsi Jambi telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan. Sistem ini mampu mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan manual, meskipun masih memerlukan peningkatan pada aspek stabilitas jaringan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa penggunaan sistem informasi yang terintegrasi berpengaruh positif terhadap efektivitas prosedur pencairan dana daerah.

5. PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan di DPM-PTSP Provinsi Jambi telah berjalan secara sistematis dan terintegrasi. Temuan ini relevan dengan teori sistem informasi yang dikemukakan oleh Jogiyanto (2017) yang menyatakan bahwa sistem informasi yang efektif merupakan kombinasi antara teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia yang saling terintegrasi dalam menghasilkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dalam konteks penelitian ini, SIPD RI terbukti mampu mempercepat proses verifikasi dan persetujuan dokumen karena seluruh tahapan dilakukan dalam satu sistem yang terkoneksi langsung dengan Rekening Kas Umum Daerah.

Secara empiris, proses pengajuan SP2D yang sebelumnya dilakukan secara manual menimbulkan potensi kesalahan administratif, keterlambatan pencairan, serta risiko kehilangan dokumen fisik. Setelah diterapkannya SIPD RI, proses menjadi lebih tertib karena setiap tahapan memiliki jejak digital yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini sejalan dengan penelitian Mutiara (2021) yang menyatakan bahwa digitalisasi sistem pengelolaan keuangan daerah mampu mengurangi kesalahan pencatatan dan meningkatkan efisiensi administrasi. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa penggunaan sistem berbasis elektronik memberikan dampak positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dari perspektif teori prosedur administrasi, Mulyadi dalam Al Az Zahra (2022) menjelaskan bahwa prosedur yang baik harus memiliki tahapan yang jelas,

melibatkan pihak-pihak yang berwenang, serta menjamin konsistensi dalam pelaksanaan transaksi. Fakta empiris yang ditemukan menunjukkan bahwa prosedur pengajuan SP2D melalui SIPD RI telah memenuhi unsur tersebut karena terdapat tahapan pengajuan oleh bendahara pengeluaran, verifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan, persetujuan oleh Pengguna Anggaran, dan penerbitan oleh Bendahara Umum Daerah. Mekanisme ini mencerminkan adanya pengendalian internal yang memadai dalam proses pencairan dana.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas sistem masih dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis. Gangguan jaringan internet, pembaruan sistem, serta keterbatasan pemahaman pengguna terhadap fitur terbaru menjadi kendala yang dapat menghambat kelancaran proses. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologi, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia. Hambarwati (2025) menegaskan bahwa implementasi sistem informasi pemerintahan akan optimal apabila didukung oleh pelatihan yang berkelanjutan dan stabilitas sarana prasarana pendukung.

Kebaruan temuan dalam penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai implementasi SIPD RI secara spesifik pada prosedur pengajuan SP2D Uang Persediaan di DPM-PTSP Provinsi Jambi. Jika penelitian terdahulu lebih banyak membahas pengaruh sistem informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah secara umum, penelitian ini memberikan gambaran empiris yang lebih rinci mengenai tahapan operasional, kendala teknis yang terjadi di lapangan, serta bentuk penyesuaian yang dilakukan oleh aparatur dalam menghadapi pembaruan sistem. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menguatkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, tetapi juga memberikan kontribusi praktis berupa pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi SIPD RI dalam konteks prosedur pencairan dana uang persediaan pada tingkat perangkat daerah.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa penerapan SIPD RI berkontribusi positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas prosedur pengajuan SP2D Uang Persediaan, meskipun masih diperlukan perbaikan pada aspek teknis dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk memaksimalkan manfaat sistem secara berkelanjutan.

6. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) dalam prosedur pengajuan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Uang Persediaan pada DPM-PTSP Provinsi Jambi telah berjalan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Implementasi sistem ini memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan efisiensi waktu proses, ketertiban administrasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Digitalisasi prosedur mampu meminimalkan kesalahan manual dan mempercepat tahapan verifikasi serta persetujuan karena seluruh proses terintegrasi dalam satu sistem. Temuan penelitian ini memperkuat teori sistem informasi yang menekankan pentingnya integrasi antara teknologi, prosedur, dan sumber daya manusia dalam menghasilkan informasi yang berkualitas dan mendukung pengambilan keputusan secara tepat waktu.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIPD RI tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem, tetapi sangat dipengaruhi oleh stabilitas infrastruktur jaringan serta kompetensi sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Kendala teknis seperti gangguan jaringan, pembaruan sistem, dan risiko kehilangan data akibat pemadaman listrik menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian agar efektivitas sistem dapat terus ditingkatkan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan empiris berupa gambaran operasional yang lebih spesifik mengenai penerapan SIPD RI dalam prosedur pencairan dana uang persediaan pada tingkat perangkat daerah, sekaligus memperluas pemahaman bahwa digitalisasi administrasi keuangan memerlukan dukungan teknis dan kapasitas aparatur secara berkelanjutan.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah penguatan konsep bahwa sistem informasi pemerintahan yang terintegrasi mampu meningkatkan efektivitas prosedur administrasi publik apabila diimbangi dengan pengendalian internal yang memadai. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi DPM-PTSP Provinsi Jambi dan instansi pemerintah daerah lainnya dalam meningkatkan kualitas implementasi SIPD RI, khususnya melalui peningkatan pelatihan pengguna dan perbaikan sarana pendukung teknologi informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, A. P., Azis, A. D., Rahman, K., & Fakhira, A. N. (2025). Do IT committee and ERP adoption affect a firm's profitability? Banking evidence from Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 9(4), 346–359.

- Adila, A. P., & Hidayah, R. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah adopsi tata kelola teknologi informasi (pada perusahaan manufaktur dan pertambangan yang terdaftar di BEI). *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(7), 5223–5233.
- Al Az Zahra. (2022). *Analisis prosedur administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Bahari, S. F. A., Komalasari, S. P., Adila, A. P., Audina, D., Trimuliani, D., Ramadhani, F., Marta, N., Syukrihadilrsyad, M., & Febrian, R. (2023). *Audit sistem informasi: Suatu pendekatan kontemporer*. Rajawali Pers.
- Hambarwati. (2025). *Implementasi sistem informasi pemerintahan daerah dalam meningkatkan transparansi keuangan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan desain sistem informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Mutiara. (2021). Analisis penerapan sistem digital dalam prosedur pencairan dana daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 5(2), 45–58.
- Paulus, J., & Kindangen, P. (2021). Pengelolaan uang persediaan dalam mendukung akuntabilitas keuangan daerah. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), 112–125.
- Pemerintah Provinsi Jambi. (2024). *Peraturan Gubernur Jambi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jambi: Pemerintah Provinsi Jambi.
- Said, A., Rahman, L., & Yusuf, M. (2021). Implementasi prosedur penerbitan SP2D dalam meningkatkan pengendalian internal pemerintah daerah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pemerintahan*, 3(1), 67–80.